



SKRIPSI

**PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN
KEMISKINAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO.13
TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
(STUDI DI KABUPATEN BONDOWOSO)**

*THE LOCAL GOVERNMENT ACHIEVED IN CARRY ON PROVERTY
ACCORDING TO LAW NUMBER 13 OF 2011 ABOUT
DESTITUTE POOR (STUDY IN BONDOWOSO DISTRICT)*

NURUL HUDA
NIM : 070710191011

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

**PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN
KEMISKINAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO.13
TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
(STUDI DI KABUPATEN BONDOWOSO)**

*THE LOCAL GOVERNMENT ACHIEVED IN CARRY ON PROVERTY
ACCORDING TO LAW NUMBER 13 OF 2011 ABOUT
DESTITUTE POOR (STUDY IN BONDOWOSO DISTRIC)*

**NURUL HUDA
NIM : 070710191011**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

*“Ketika kamu belum berhasil, Itu bukanlah kegagalan.
Karena kegagalan yang sesungguhnya adalah ketika kamu bersikap sombong
atas keberhasilanmu ...” **

(Mario Teguh)

* Dikutip dari : *Menuju Puncak Prestasi*, Yogyakarta : Kanisius, 2011, hlm.2

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku Ayahanda H.M. Lutfi dan Ibunda Hj. Anisatussaqdiyah, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas ;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;

PERSYARATAN GELAR

**PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN
KEMISKINAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO.13
TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
(STUDI DI KABUPATEN BONDOWOSO)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

NURUL HUDA
NIM : 070710191011

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 28 JUNI 2013**

Oleh :

Pembimbing,

**R.A. RINI ANGGRAINI, S.H, M.H
NIP : 195911151985122001**

Pembantu Pembimbing,

**IWAN RACHMAD S., S.H., M.H
NIP : 197004101998021001**

PENGESAHAN

**PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN
KEMISKINAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO.13
TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
(STUDI DI KABUPATEN BONDOWOSO)**

Oleh :

NURUL HUDA
NIM : 070710191011

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H
NIP. 195911151985122001

IWAN RACHMAD S., S.H., M.H
NIP. 197004101998021001

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 28

Bulan : Juni

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

ANTI KOWATI, S.H., M.H
NIP : 196112021988022001

ROSITA INDRAYATI, S.H, M.H.
NIP : 197805312005012001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **R.A. RINI ANGGRAINI, S.H, M.H** : (.....)
NIP : 195911151985122001

2. **IWAN RACHMAD S., S.H., M.H** : (.....)
NIP : 197004101998021001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Huda
NIM : 070710191011
Fakultas : Hukum
Jurusan / Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Peranan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Undang Undang No.13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Studi di Kabupaten Bondowoso)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Juni 2013
Yang menyatakan,

NURUL HUDA
NIM : 070710191011

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Peranan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Kemiskinan Berdasarkan Undang Undang No.13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Studi di Kabupaten Bondowoso)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H, M.H, selaku pembimbing skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
2. Bapak Iwan Rachmad Sutiyono, S.H., M.H., sebagai pembantu pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
3. Ibu Antikowati, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufroon, S.H., M.H, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad Sutiyono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;

8. Orang tua, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, serta dukungan yang telah diberikan ;
9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2007, khususnya teman-teman KKM, Ricky, Ferry, Rico, dan Hendra Moe dan teman-teman lain yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 28 Juni 2013
Penulis,

Nurul Huda

RINGKASAN

Tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Negara berkewajiban mensejahterakan seluruh warga negaranya dari kondisi kefakiran dan kemiskinan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewajiban negara dalam membebaskan dari kondisi tersebut dilakukan melalui upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar. Upaya tersebut harus dilakukan oleh negara sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional termasuk untuk mensejahterakan fakir miskin. Landasan hukum bagi upaya mensejahterakan fakir miskin sampai saat ini masih bersifat parsial yang tersebar di berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan adanya undang-undang yang secara khusus mengatur fakir miskin, yang kemudian diakomodasi dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu ; (1) Bagaimanakah implementasi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso dalam penanganan kemiskinan ? dan (2) Bagaimanakah kendala dalam penanganan kemiskinan tersebut dan kebijakan apa yang telah dilaksanakan ?

Tujuan umum dilaksanakannya penulisan hukum ini antara lain : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya Hukum Tata Negara. Sedangkan tujuan khusus dalam penulisan hukum ini adalah : untuk mengetahui dan memahami implementasi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso dalam penanganan kemiskinan dan kendala dalam penanganan kemiskinan tersebut dan kebijakan apa yang telah dilaksanakan. Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya

tulis ilmiah yang dapat dipertanggung-jawabkan, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Hasil penelitian yang diperoleh antara lain bahwa, Program kegiatan pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bondowoso dilaksanakan bekerjasama lintas organisasi dengan Dinas-Dinas terkait lain, sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai bentuk program Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso. Faktor yang mendukung sosialisasi program keluarga harapan adalah adanya dukungan pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso sangat besar terhadap program keluarga harapan yaitu bekerja sama dengan pemerintah pusat. Selain pemerintah adanya juga dukungan dari tokoh masyarakat setempat khususnya. Dengan adanya dukungan dari pemerintah maka proses sosialisasi Program keluarga Harapan akan lebih cepat kepada rumah tangga sangat miskin karena dalam pranata sosial tokoh masyarakat mempunyai peran yang sangat penting sebab mereka menjadi tokoh yang pendapat-pendapatnya sering didengar oleh masyarakat, menjadi panutan dan dihormati. Faktor lain yang mendukung adalah adanya instansi pemerintah yang lain yang bisa diajak bekerja sama untuk mensosialisasikan program keluarga harapan. Mengenai faktor penghambat dalam sosialisasi program keluarga harapan oleh kurangnya pemahaman rumah tangga sangat miskin tentang pentingnya program ini bagi mereka, hal ini disebabkan sebagian besar masyarakat pengetahuannya masih rendah.

Saran yang diberikan bahwa, Masalah kemiskinan merupakan persoalan yang cukup sulit ditangani. Pemerintah membentuk Undang-Undang No.13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin pada 18 Agustus 2011. Memang kita akui, setelah 66 tahun Indonesia merdeka, kemiskinan masih menjadi problem klasik meski dari tahun ke tahun pengentasannya menjadi target dalam program pembangunan nasional, demikian halnya dengan kondisi di Kabupaten Bondowoso. Masih banyaknya masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengatasi hal tersebut untuk menjadi bangsa yang besar dan mandiri.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
Halaman Daftar Tabel	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Pemerintah Daerah	9
2.1.1 Definisi Pemerintah Daerah	9
2.1.2 Kewenangan Pemerintah Daerah	11
2.1.3 Perangkat Pemerintah Daerah	15
2.2 Otonomi Daerah	16

2.2.1	Pengertian Otonomi Daerah	16
2.2.2.	Hakikat Otonomi Daerah	20
2.3	Peranan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Kemiskinan	24
2.3.1	Dasar Hukum Penanganan Kemiskinan di Indonesia	24
2.3.2	Peranan Pemerintah dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan	27
BAB III	PEMBAHASAN	31
3.1	Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso dalam Penanganan Kemiskinan	31
3.2	Kendala dalam Implementasi Kebijakan dan Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso dalam Penanganan Kemiskinan	36
BAB IV	PENUTUP	51
4.1	Kesimpulan	51
4.2	Saran-saran	52
DAFTAR BACAAN		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Undang Undang No.13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir
Miskin

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1 : Komposisi Jumlah Penduduk, Rumah Tangga dan Kepadatan Kabupaten Bondowoso Tahun 2010-2012	31
Tabel 2 : Komposisi Penduduk Kabupaten Bondowoso Menurut Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2012.....	32
Tabel 3 : Jumlah Penduduk Miskin Per Wilayah Kecamatan di Kabupaten Bondowoso Pada Periode Tahun 2012.....	38